

ANALISIS KEBIJAKAN MONETER, FISKAL DAN INFLASI PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

Ach Hakiki¹, Babay Suhaimi², Nadhir Mu'ammara³, Dewi Kurniasari⁴

Universitas Indonesia¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3,4}

Email Korespondensi: ach.hakiki@ui.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat memberikan manfaat seperti peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan standar hidup dan pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas. Penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keterkaitan peran kebijakan moneter, fiskal dan inflasi dalam pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks. Kedua, inflasi yang rendah dan stabil dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi bagi dunia usaha dan konsumen. Ketiga, kebijakan moneter dan fiskal dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Fiskal, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

Stable and sustainable economic growth is the main goal of the country's economic policy. Strong economic growth can provide benefits such as higher per capita income, lower unemployment rates, improved living standards and broader socioeconomic development. The purpose of this qualitative study using descriptive methods is to determine the extent to which the role of monetary, fiscal and inflationary policies is related to economic growth. The results of this study show that: First, the relationship between inflation and economic growth is very complex. Second, low and stable inflation can support economic growth by creating a more predictable environment for businesses and consumers. Third, monetary and fiscal policy can play an important role in controlling inflation and promoting economic growth.

Keywords: *Monetary Policy, Fiscal, Inflation, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Perekonomian yang stabil sangat penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan suatu negara. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerintah biasanya menggunakan dua alat kebijakan utama di tingkat makro, yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter adalah perangkat yang diterapkan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan suplai uang dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu (M. N. Natsir, 2018). Kebijakan ini juga dapat diartikan sebagai upaya bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan kredit di dalam perekonomian, dengan tujuan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Keputusan yang diambil oleh bank sentral sangat mempengaruhi struktur perekonomian suatu negara. Bank sentral memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengendalikan aspek-aspek penting dari sistem keuangan dan moneter suatu negara (Nopirin, 2009). Oleh karena itu, bank sentral memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan moneter serta mengawasi dan mengendalikan

implementasinya.

Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu (Prawirosetoto, 2022). Kebijakan fiskal melibatkan perencanaan pengeluaran dan perpajakan pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja penuh, dan menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Kerja sama antara kebijakan fiskal dan moneter bertujuan untuk mencapai beberapa hal, termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja penuh, dan menjaga stabilitas harga komoditas (Paramita, 2021).

Dalam perekonomian negara berkembang, sering kali terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di sektor riil. Penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan ekonomi untuk memahami dampak dari injeksi daya beli yang signifikan terhadap permintaan dan penawaran dalam perekonomian (Jhingan, 2023). Sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian merupakan aspek penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai *automatic stabilizer* merupakan salah satu pendekatan yang dianggap ideal dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. Artinya, Dalam kondisi di mana perekonomian sedang mengalami ekspansi atau fase pertumbuhan, kebijakan fiskal yang tepat biasanya akan cenderung berfokus pada mengurangi pengeluaran pemerintah atau meningkatkan penerimaan pajak. Dengan menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan fase siklus bisnis, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengurangi fluktuasi ekonomi yang berlebihan dan menjaga stabilitas makroekonomi (Samuelson, A. Paul & Wiliam, 2004). Kebijakan fiskal

yang responsif terhadap kondisi ekonomi merupakan contoh penting dari bagaimana kebijakan publik dapat berfungsi sebagai *automatic stabilizer*, membantu menstabilkan perekonomian dan menjaga kesejahteraan masyarakat (Surjadiningsih et al., 2012).

Salah satu penelitian yang berhubungan dengan kajian ini dilakukan oleh Simorangkir dkk., (2005) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum faktor non-moneter memiliki kekuatan prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor moneter. Faktor non-moneter yang paling berpengaruh terhadap inflasi di daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran rutin, dan biaya transportasi. Penelitian yang dilakukan oleh Budi & Amrita, (2005) mengenai stabilitas harga, konvergensi inflasi, dan otonomi daerah menyimpulkan bahwa inflasi antar daerah di Indonesia tidak terlalu berbeda dan cenderung konvergen. Selama periode otonomi daerah, konvergensi inflasi antar daerah di Indonesia relatif cepat dibandingkan dengan periode sebelum otonomi daerah.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaannya adalah fokus kajian penelitian yang sama-sama mengkaji sejauh mana dampak yang telah terjadi dari beberapa data inflasi yang ada di beberapa daerah, perbedaan dari penelitian ini adalah, peneliti membahas tentang dampak dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya inflansi, sedangkan penelitian diatas membahas tentang faktor non moneter dan faktor moneter, stabilitas harga, konvergensi inflasi, dan otonomi daerah yang menyebabkan terjadinya inflansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keterkaitan peran kebijakan moneter, fiskal dan inflasi dalam pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN TEORI

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang dapat disesuaikan dengan siklus kegiatan ekonomi. Menurut Mishkin, (2008), kebijakan moneter mencakup semua upaya atau tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi variabel-variabel moneter dalam perekonomian, seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, ketersediaan kredit, dan nilai tukar mata uang. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan ekonomi makro yang bertujuan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam perekonomian (M. Natsir, 2014).

Menurut Bank Indonesia (2017), kebijakan moneter adalah bentuk pengendalian besaran moneter, yang dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, serta pengendalian suku bunga. Tujuannya adalah mencapai stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, penurunan pengangguran, dan inflasi yang rendah atau stabilitas harga.

Menurut (Nopirin, 2009) kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan atau kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mengendalikan atau mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit di dalam perekonomian. Bank sentral bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan moneter di sebuah negara. Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran (Kuncoro, 1995) dalam jurnal (Nangarumba, 2016).

Kebijakan moneter mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh bank

sentral untuk mempengaruhi perkembangan variabel moneter dalam perekonomian (Mishkin, 2008). Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, tujuan kebijakan moneter adalah membantu mencapai sasaran makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran ini merupakan tujuan akhir dari kebijakan moneter (Natsir, 2018).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter berhasil dalam pelaksanaannya. Pertama, tidak ada bank sentral yang benar-benar independen tanpa campur tangan pemerintah. Namun, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, seperti kebijakan fiskal. Kedua, pengendalian inflasi hanya salah satu sasaran Bank Sentral. Sasaran-sasaran lain kadang bertentangan dengan pengendalian inflasi, sehingga Bank Sentral seharusnya fokus pada pengendalian inflasi sebagai sasaran utama. Ketiga, Bank Sentral harus mampu memprediksi inflasi dengan akurat. Keempat, Bank Sentral harus dapat mengawasi instrumen-instrumen kebijakan moneter. Kelima, pelaksanaan target inflasi yang konsisten dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan (Rasyidin et al., 2022).

Berikut adalah beberapa jenis kebijakan moneter yang umum diterapkan oleh bank sentral untuk memengaruhi kondisi moneter dan ekonomi: kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, pengaturan persyaratan cadangan bank, kebijakan kredit selektif, forward guidance, investasi mata uang, dan kebijakan makro prudensial. Bank sentral dapat menggunakan kombinasi berbagai kebijakan moneter ini untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga stabilitas harga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan (M.

Natsir, 2014). Pemilihan dan penggunaan jenis kebijakan moneter bergantung pada kondisi perekonomian dan tantangan yang dihadapi negara pada waktu tertentu.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan makroekonomi yang melibatkan tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian (Samuelson, A. Paul & Wiliam, 2004). Kebijakan fiskal melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak untuk merangsang tambahan permintaan bagi barang dan jasa, terutama dari rumah tangga. Fenomona ini juga dapat terjadi jika sebuah pemerintahan melakukan pemotongan pajak sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk merangsang perekonomian. Pemotongan pajak bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan lebih banyak uang kepada individu dan perusahaan (Dwiyanti et al., 2023). Pemotongan pajak meningkatkan disposable income atau pendapatan yang tersedia bagi rumah tangga setelah membayar pajak. Sebagai hasilnya, rumah tangga memiliki lebih banyak uang yang dapat mereka belanjakan atau tabung. Peningkatan disposable income cenderung mempengaruhi perilaku konsumsi rumah tangga. Rumah tangga cenderung meningkatkan konsumsi mereka sebagai respons terhadap peningkatan pendapatan ini. Marginal Propensity to Consume (MPC) adalah proporsi tambahan dari pendapatan yang dihabiskan oleh konsumen untuk konsumsi. Dengan pemotongan pajak, disposable income meningkat, dan jika MPC meningkat, maka akan ada peningkatan konsumsi yang lebih besar untuk setiap unit peningkatan pendapatan. Peningkatan konsumsi oleh rumah tangga berdampak pada peningkatan permintaan agregat di dalam perekonomian. Ini

menciptakan efek multiplier, di mana setiap unit tambahan pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga menghasilkan tambahan pendapatan bagi produsen dan usaha-usaha lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan konsumsi orang lain. Dengan demikian, peningkatan pengeluaran akibat stimulus fiskal dapat memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan output atau sisi penawaran dalam perekonomian. Andersen, (2005) berpendapat bahwa kebijakan fiskal bisa mempengaruhi sebuah inflasi dalam perekonomian yang bisa berpengaruh pada output nasional.

Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Ini mencakup berbagai tindakan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam anggaran. Penerimaan negara dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan bukan pajak, pinjaman, dan bantuan luar negeri. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara guna mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional (Bird & Francois Vaillancourt, 1998). Artinya, keuangan negara tidak hanya bertujuan membiayai tugas rutin pemerintah, tetapi juga mendukung pembangunan, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan mengatasi tantangan sosial (Gilarso, 2004).

Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dapat diterapkan melalui berbagai instrumen untuk mencapai tujuannya. Salah satu instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengaturan sistem pajak (Bahari & SBM, 2019). Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan berbagai jenis pajak lainnya untuk mempengaruhi perilaku ekonomi,

mendapatkan pendapatan bagi negara, dan mempromosikan keadilan sosial. Pemerintah juga menggunakan pengeluaran publik sebagai instrumen kebijakan fiskal. Ini mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program dan proyek, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Pengeluaran ini dapat digunakan untuk merangsang tumbuhnya ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amantha, 2021).

Pemerintah dapat memberikan transfer tunai langsung kepada individu atau kelompok tertentu, seperti program bantuan sosial bagi keluarga miskin atau tunjangan pensiun bagi warga lanjut usia. Subsidi juga dapat diberikan untuk mengurangi biaya hidup atau mempromosikan penggunaan sumber energi bersih. Pemerintah dapat menggunakan pembiayaan publik, seperti penerbitan obligasi pemerintah, untuk mendapatkan dana tambahan yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran publik. Ini bisa menjadi cara untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur besar atau untuk mengatasi defisit anggaran. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada individu atau perusahaan untuk mendorong perilaku tertentu yang dianggap menguntungkan bagi perekonomian. Misalnya, insentif pajak dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan atau yang beroperasi di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan stimulus ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan hutang publik untuk mengelola keuangan negara (Amantha, 2021). Ini melibatkan pengaturan tingkat utang negara, struktur pembayaran utang, dan kebijakan terkait lainnya untuk memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Tujuan Utama Kebijakan Fiskal

Prioritas utama dalam kebijakan fiskal adalah mencapai pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, tujuan menjadikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi untuk meningkatkan manfaat yang luas, seperti peningkatan pendapatan per-kapita, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Venti Eka Satya, 2014). Saat ekonomi tumbuh pesat, biasanya terjadi peningkatan aktivitas bisnis dan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat berpotensi meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Salah satu strategi yang umum digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal adalah dengan mengurangi pajak (Prawirosetoto, 2022). Pemotongan pajak dapat meningkatkan daya beli konsumen karena tersedia lebih banyak uang untuk digunakan. Ini dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, mendorong aktivitas bisnis, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan pengeluaran pemerintah juga dapat menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah yang lebih besar dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama jika dikelola dengan efisien dan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi dampak ekonomi besar.

Mencapai tingkat kerja yang tinggi juga merupakan tujuan penting lainnya dalam kebijakan fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari output atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja yang memadai. Salah satu tujuan umum dari kebijakan fiskal adalah mencapai tingkat kerja yang tinggi atau mengurangi tingkat pengangguran (Venti Eka Satya, 2014). Hal ini karena tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan dampak negatif seperti penurunan pendapatan, ketidakstabilan sosial, dan penurunan kesejahteraan. Pengurangan pajak

dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran (Khamdana, 2016).

Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi efek fluktuasi dalam perekonomian. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menanggapi perubahan dalam siklus bisnis dan mengurangi tingkat volatilitas ekonomi. pola ekspansi ekonomi yang diikuti oleh perlambatan ekonomi adalah fenomena umum dalam perekonomian global dan sering disebut sebagai siklus bisnis. Siklus ini terdiri dari periode ekspansi, di mana ekonomi tumbuh cepat, diikuti oleh periode kontraksi, di mana ekonomi melambat atau bahkan mengalami resesi. Pemerintah memiliki opsi untuk mengurangi risiko dalam siklus bisnis dengan menerapkan kebijakan yang mendukung ekonomi saat menghadapi perlambatan atau resesi. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah kebijakan fiskal ekspansif, di mana pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk merangsang aktivitas ekonomi. Penggunaan kebijakan fiskal untuk mengendalikan ekspansi ekonomi berlebihan adalah langkah yang penting untuk mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan seperti inflasi tinggi (Paramita, 2021). Ketika ekonomi mengalami fase ekspansi yang kuat, permintaan agregat dapat meningkat secara signifikan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tekanan inflasi. Pada dasarnya, pemerintah memiliki peran dalam upaya untuk mengurangi tren "*boom*" dan "*bust*" dalam siklus bisnis, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui beragam instrumen kebijakan fiskal dan moneter untuk menanggapi perubahan dalam kondisi ekonomi.

Jenis Kebijakan Fiskal

Pertama, kebijakan fiskal ekspansif umumnya digunakan selama masa resesi atau periode siklus bisnis rendah lainnya sebagai upaya untuk merangsang aktivitas ekonomi yang melambat. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dirancang untuk merangsang aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan selama masa resesi atau ketika ekonomi mengalami penurunan. Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatkan jumlah uang yang tersedia bagi konsumen sehingga mereka dapat meningkatkan pengeluaran mereka. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat. Ketika konsumen memiliki lebih banyak uang, mereka cenderung meningkatkan pembelian barang dan jasa, yang pada gilirannya memicu aktivitas bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal kontraktual, di sisi lain, digunakan untuk melambatkan pertumbuhan ekonomi, terutama ketika inflasi meningkat terlalu cepat atau ketika ekonomi mengalami *overheat*. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan pajak dan/atau memotong pengeluaran pemerintah. Hal ini bertentangan dengan kebijakan fiskal ekspansif yang berupaya memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pengeluaran dan/atau pengurangan pajak (Gilarso, 2004).

Inflasi

Fluktuasi harga barang dan jasa adalah fenomena yang umum terjadi dalam perekonomian. Harga barang dan jasa dapat berfluktuasi sebagai respons terhadap berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik (Resnia, 2012). Fluktuasi harga barang dan jasa dapat timbul karena berbagai faktor,

seperti peningkatan permintaan atau biaya produksi yang meningkat. Peningkatan harga secara umum dan terus menerus dari barang dan jasa dalam perekonomian dikenal sebagai inflasi. Inflasi merupakan kenaikan bertahap dalam tingkat harga umum dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam periode waktu tertentu (Samuelson, A. Paul & Wiliam, 2004).

Namun, kenaikan harga yang hanya terjadi pada satu atau beberapa item saja dan bersifat sementara tidak dapat dianggap sebagai inflasi. Inflasi merujuk pada peningkatan umum dan berkelanjutan dalam tingkat harga barang dan jasa secara luas di perekonomian dalam jangka waktu yang lebih panjang (Febriana, Irma; Kencono, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian, yang merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu sosial. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, serta tindakan-tindakan manusia. Penelitian ini tidak mengutamakan pengukuran atau perhitungan data kualitatif, melainkan lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diamati (Afrizal, 2017). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan, disusun, dan dideskripsikan berdasarkan sumber daya seperti dokumen, data, dan informasi aktual (Sugiyono, 1999).

Fokus utama penelitian ini adalah dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemandirian daerah, terutama di daerah-daerah yang mengalami pemekaran. Menurut Halim (2001) sebagaimana dikutip dalam penelitian oleh (Aminuddin, 2017), penilaian keberhasilan desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui dua aspek, yaitu aspek makro-ekonomi dan aspek

kesehatan fiskal. Dalam aspek makro-ekonomi, kinerja otonomi daerah dan dampaknya terhadap indikator pembangunan utama seperti pertumbuhan ekonomi, partisipasi tenaga kerja, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan disparitas, dan upaya mengatasi kemiskinan dapat dinilai melalui berbagai variabel. Sementara itu, dalam aspek kesehatan fiskal daerah, evaluasi dapat difokuskan pada pertumbuhan kapasitas fiskal, pengurangan rasio ketergantungan pada dana perimbangan, dan penurunan kesenjangan fiskal antar daerah (Mukhlis & Makhya, 2019).

PEMBAHASAN

Inflasi dapat diukur dalam lingkup yang luas atau kecil, tergantung pada ruang lingkup barang dan jasa yang diamati. Kedua jenis pengukuran inflasi tersebut memiliki kegunaan dan relevansi mereka sendiri. Inflasi umum memberikan gambaran tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan dan memengaruhi kebijakan moneter dan fiskal, sementara inflasi khusus dapat memberikan informasi yang lebih spesifik dan berguna bagi pelaku bisnis atau perencana kebijakan yang berfokus pada sektor-sektor tertentu (Febriana, Irma; Kencono, 2019). Namun, semakin berkembangnya perekonomian dan variasi komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat membuat perhitungan inflasi menjadi lebih kompleks (Samuelson, A. Paul & Wiliam, 2004).

Indeks harga merupakan instrumen yang dipergunakan untuk menilai perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa dalam suatu rentang waktu yang ditentukan (Sukirno, 2006). Pilihan indeks yang digunakan tergantung pada keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Namun, CPI dan PPI sering menjadi indikator yang paling penting dalam pemantauan inflasi dan kebijakan ekonomi karena mereka memberikan gambaran yang komprehensif tentang perubahan harga di perekonomian.

PPI sering kali digunakan sebagai indikator awal atau indikator terkemuka untuk mengukur tekanan inflasi yang mungkin akan dialami oleh konsumen di masa mendatang. Peningkatan harga di tingkat produsen dapat menunjukkan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen karena biaya produksi yang lebih tinggi mungkin akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk peningkatan harga jual. Data CPI digunakan oleh pemerintah, bank sentral, analis ekonomi, dan masyarakat umum untuk memantau inflasi, mengukur daya beli uang, menyesuaikan pembayaran kontrak yang terkait dengan inflasi (seperti pensiun atau jaminan sosial), dan pengambilan sebuah keputusan yang berkaitan dengan peraturan perekonomian, investasi, dan perencanaan keuangan. Namun, Selain CPI (Indeks Harga Konsumen) dan PPI (Indeks Harga Produsen), terdapat dua indikator inflasi lainnya yang juga penting untuk dipahami, yaitu Produk Domestik Bruto Deflator dan Indeks Harga Aset. Kedua indikator ini memberikan informasi tambahan yang penting untuk memahami dinamika inflasi dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, setiap bulan bisa dilakukan frekuensi perhitungan, setiap tahun atau kuartal, disesuaikan pada kebutuhan dan tujuan penggunaan indeks tersebut (Tulus et al., 2020).

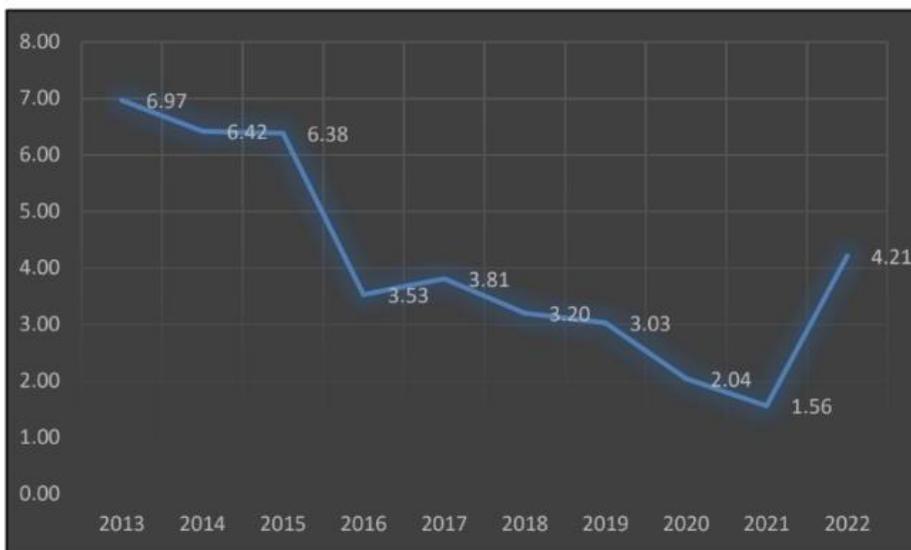
Keterkaitan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Pertumbuhan ekonomi dan inflasi memiliki hubungan yang kompleks. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan akan menghasilkan peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan agregat di ekonomi. Namun, jika pertumbuhan ekonomi terlalu cepat atau tidak seimbang, hal ini dapat menyebabkan tekanan inflasi karena permintaan yang berlebihan terhadap barang dan jasa. Kedua, Inflasi yang rendah dan stabil dapat

mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi bagi bisnis dan konsumen. Namun, inflasi yang tinggi atau tidak stabil dapat mengganggu kegiatan ekonomi dengan menyebabkan ketidakpastian, menurunkan daya beli uang, dan merusak kepercayaan konsumen dan investor. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat atau bahkan mengalami kontraksi jika inflasi tidak terkendali. Ketiga, Kebijakan moneter dan fiskal dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter, yang dilaksanakan oleh bank sentral, dapat digunakan untuk mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga. Sementara itu, kebijakan fiskal, yang dilaksanakan oleh pemerintah, dapat digunakan untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Kedua jenis kebijakan ini harus dikoordinasikan dengan baik agar mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabilitas harga (Nurlina & Zurjani, 2020).

Inflasi yang rendah, mengindikasikan negara dapat mengelola perekonomiannya secara baik. Hal ini, dikarenakan inflasi yang terjadi sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, karena inflasi mempengaruhi daya belinya. Untuk itu, pemerintah harus senantiasa selalu berupaya membuat kebijakan yang dapat menekan laju inflasi. Namun, agar inflasi tidak berdampak negatif terhadap perekonomian, telah ditetapkan batas yang dapat ditoleransi. Tingginya sebuah inflansi dan tidak stabil, bisa menyebabkan dampak pada turunnya daya beli, kondisi ketidakpastian, dan berkurangnya daya saing produk nasional.

Di samping itu, inflasi juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya pada perekonomian. Biaya yang ditimbulkannya, dapat digolongkan dalam

kelompok biaya inflansi yang terduga dan tidak terduga. Biaya inflansi yang terduga meliputi *shoeleather cost*, *menu costs*, distorsi pajak, dan peningkatan volatilitas harga relatif. Biaya inflansi yang tidak terduga, meliputi redistribusi pendapatan dan biaya lainnya yang tergolong biaya yang tak terduga (Salim & Fadilla, 2020). Di bawah ini adalah inflansi yang terjadi di Indonesia pada periode 2013-2022:



Gambar 1
Data Inflansi dari tahun 2013-2022, Sumber: Bank Indonesia

Inflansi di Indonesia memiliki tren yang semakin menurun selama 9 tahun terakhir, tetapi pada 2022 mengalami peningkatan lagi. Pada 2020, dengan adanya pandemi covid-19 mengakibatkan inflasinya turun lagi menjadi 2,04, dan pada 2021 inflasinya semakin menurun menjadi 1,56, tetapi pasca pemberlakuan pelonggaran kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), mengakibatkan inflansi pada 2022 kembali meningkat sebesar 4,21. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflansi yang wajar, masih dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian, tetapi pada tahapan tertentu, pemerintah perlu mengambil

kebijakan agar inflasinya dapat segera kembali pada tingkat yang wajar, karena bila tidak justru pertumbuhan ekonominya yang telah dicapai akan diikuti dengan inflasi yang lebih tinggi lagi, sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi riilnya menjadi negatif dan mengakibatkan kesejahteraan masyarakatnya menjadi semakin menurun. Untuk itu, pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya perlu di sesuaikan dengan kemampuannya.

Kebijakan moneter dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan ekonomi, yang mencakup tingginya pertumbuhan ekonomi, rendahnya pengangguran, inflasi yang terkendali, dan neraca pembayaran yang seimbang. Stabilitas harga sering menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi, terlebih pada negara yang sedang mengalami perkembangan atau mengalami inflasi yang tinggi. Kebijakan moneter sering dianggap lebih efektif dalam mengatasi inflasi daripada kebijakan fiskal. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa efektivitas kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi dapat bergantung pada kondisi ekonomi dan karakteristik pasar yang ada. Dalam beberapa kasus, kombinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi dan mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Penting bagi jumlah uang beredar untuk sejalan dengan pertumbuhan ekonomi agar menghindari risiko deflasi. Dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi juga bisa dihasilkan dari sebuah kebijakan moneter, yang bisa dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua elemen kunci dalam kebijakan ekonomi makro yang berkaitan erat dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter bertujuan mendukung pencapaian

sasaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, kebijakan moneter membantu menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran bank sentral dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneter yang tepat sangatlah penting untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Ketika likuiditas berlebihan, risiko muncul dalam bentuk inflasi karena terlalu banyak uang beredar yang mengejar jumlah barang dan jasa yang relatif tetap. Di sisi lain, jika likuiditas terlalu rendah, hal ini dapat menghambat aktivitas ekonomi karena sulitnya mendapatkan kredit dan modal yang diperlukan untuk investasi dan konsumsi. Dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan mengendalikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi inflasi, untuk mencapai target Tingkat inflansi Bank Indonesia melakukan Upaya sebagai bagian dari kebijakan moneter. Melalui perencanaan, pengalokasian, dan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan kebijakan fiskal seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas fiskal dan makroekonomi secara keseluruhan. (Madjid, 2007).

Tujuan utama kebijakan ekonomi suatu negara adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh manfaat yang dapat diperoleh dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan standar hidup, dan kemajuan sosial ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, mencapai dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan prioritas bagi pemerintah dan lembaga

ekonomi di banyak negara (Sukirno, 2006). Selain itu, jika pertumbuhan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari pertumbuhan harga (inflasi), ini dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat lebih berkelanjutan. Ini bisa memberikan indikasi positif kepada pemerintah dan lembaga kebijakan untuk terus menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil tanpa mengorbankan stabilitas harga. Oleh karena itu, koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

KESIMPULAN

Keterbatasan kebijakan moneter dan fiskal menjadi tantangan dalam mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga dapat menurunkan inflasi tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan fiskal seperti pengurangan belanja publik bisa mengurangi inflasi namun juga mengurangi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor eksternal seperti gejolak pasar global atau ketidakpastian politik juga membatasi efektivitas kedua kebijakan ini.

Kerja sama antara kebijakan moneter dari bank sentral dan kebijakan fiskal dari pemerintah sangat diperlukan. Contohnya, menyesuaikan suku bunga dan anggaran belanja dapat mengendalikan inflasi tanpa merusak pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter berperan utama dalam menciptakan kondisi ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, inflasi yang terkendali, dan stabilitas neraca pembayaran. Stabilitas harga menjadi fokus penting, terutama bagi negara berkembang, untuk membangun fondasi ekonomi yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun kebijakan moneter efektif dalam menghadapi inflasi, tidak ada pendekatan tunggal yang bisa menangani semua tantangan ekonomi.

Kebijakan moneter dan fiskal sering kali harus bekerja sama dalam kerangka kebijakan yang terkoordinasi. Efektivitas kebijakan moneter dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga tergantung pada kondisi ekonomi dan mekanisme transmisi kebijakan. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dan struktural lainnya sangat penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Pengguna Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (4th ed.).
- Amantha, G. K. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- Aminuddin, M. R. (2017). *Pengaruh Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku*. Universitas Brawijaya.
- Andersen, T. . (2005). Is There a Role for an Active Fiscal Stabilization Policy? *CES Ifo Economic Studies*, 51(4), 511–547.
- Bahari, F., & SBM, N. (2019). Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.759>
- Bird, R. M., & Francois Vaillancourt. (1998). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang: Tinjauan Umum, dalam Richard Bird dan Francois Vailancourt*. Gramedia Pusaka Utama.
- Budi, S. R., & Amrita, F. (2005). Stabilitas Harga, Konvergensi Inflasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Makalah Lomba Karya Tulis Mahasiswa Bank Indonesia. *Tidak Di Publikasikan*.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 109–118. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Febriana, Irma; Kencono, A. (2019). Inflasi Harga Konsumen dan Inflasi Harga Produsen di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, September, 103–108.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Edisi Revi). Yogyakarta Kanisius.

- Jhingan, M. . (2023). *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*. PT. Raya Grafindo Persada.
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–38. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59>
- Kuncoro, M. (1995). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Prisma.
- Mishkin, F. S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan* (Edisi ke 8). Salemba Empat.
- Mukhlis, M., & Makhya, S. (2019). Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/22803/pdf>
- Nangarumba, M. (2016). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(2), 114–130. <https://doi.org/10.17977/um002v8i22016p114>
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi moneter & Kebanksentralan*. Mitra Wacana Media.
- Natsir, M. N. (2018). Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Ekspektasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 13(3), 288–307. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i3.385>
- Nopirin. (2009). *Ekonomi Moneter*. BPFPE.
- Nurlina, & Zurjani. (2020). Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia. *Quantitative Economics Journal*, 2(3), 126–136. <https://doi.org/10.24114/qej.v2i3.17434>
- Paramita, R. (2021). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia Periode 1984-2019. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 6(1), 152–168. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v6i1.85>
- Prawirosetoto, F. X. Y. (2022). Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 132–143.
- Rasyidin, M., Saleh, M., Muttaqim, H., Nova, N., & Khairani, C. (2022). Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap inflasi pra dan selama pandemi covid 19. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 225–231.
- Resnia, R. (2012). Fluktuasi Harga Bahan Pangan Pokok (Bapok) Dan

- Daya Beli Kelompok Masyarakat Berpendapatan Rendah. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(2), 169–188.
- Salim, A., & Fadilla. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Samuelson, A. Paul & Wiliam, D. N. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi* (Tujuh Bela). Erlangga.
- Simorangkir, I., & dkk. (2005). Identifikasi faktor-faktor Penentu Inflasi Regional Dalam Era Otonomi Daerah. *Pusat Pendidikan Dan Kebanksentralan, Bank Indonesia*.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Makkro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Surjadiningsih, N., Diah G.A, U., & Trisnanto, B. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 389–419.
- Tulus, T., Ahmad, A. A., & Suharno, S. (2020). Mengukur efektifitas program pengendalian inflasi pada hari besar keagamaan (idul fitri, natal dan tahun baru) di kota tegal. *Inovasi*, 16(1), 51–59.
- Venti Eka Satya. (2014). Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013. *Kajian*, 19(2), 145–166.